



EDISI RABU 12 AGUSTUS 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Prabowo Minta Laba Danantara Jadi Cadangan APBN

05

NUSANTARA
Giliran Kebakaran Gunung Gede yang Meluas

10

LISTSTYLE
Warna Lipstik agar Tampak Lebih Segar Nude Pink
hingga Soft Berry

ANATOMI KORUPSI KUOTA HAJI 200 DOLLAR DIDUGA MENGALIR KE YAQUT

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang pembacaan dakwaan kasus korupsi alokasi kuota haji periode 2022-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (11/8/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguraikan kebijakan pengalihan 50 persen kuota haji khusus tambahan tanpa kajian teknis resmi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar (Rp622.090.207.166,41). Angka ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI. Praktik melawan hukum dilakukan Yaqut bersama mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Azis (Gus Alex), Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba. Mereka memfasilitasi pengisian porsi terobosan jemaah tanpa masa tunggu. Dalam konstruksi dakwaan, Yaqut dituding memperkaya diri sendiri berupa penerimaan uang valuta asing senilai USD 271.500 sebagai imbalan komitmen diskresi. Selain itu juga memperkaya Ishfah Abidal Azis sebesar Rp93,6 miliar. Tak hanya itu, kebijakan ini turut menyalurkan keuntungan ekonomis bernilai akumulatif Rp478,17 miliar kepada 313 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta USD 26.500 ke Koperasi Perahu. Menanggapi tuduhan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Yaqut membantah menerima aliran dana satu rupiah pun. Dua menegaskan bahwa seluruh transaksi dinikmati pihak lain. Tim kuasa hukumnya pun bersiap melayangkan nota keberatan (eksepsi) pada persidangan mendatang. **BACA HAL 11...**

Kerugian Negara



RP 622.09 MILIAR

Berdasarkan audit investigatif BPK RI

Modus



Kuota haji khusus tambahan
2023-2024 dialihkan 50%



Tanpa
kajian teknis resmi



Mengakomodasi jemaah tanpa
masa tunggu



Diduga disertai penarikan
fee percepatan

Sumber :
Berbagai Sumber
Diolah

PIHAK TERDAKWA & DUGAAN ALIRAN DANA



Yaqut Cholil Qoumas (USD 271.500)
mantan Menteri Agama



Ishfah Abidal Azis (USD 5.233.800 + Rp330 juta)
mantan Stafsus Menag



Ismail Adham
Direktur Operasional PT Maktour



Asrul Azis Taba
Ketua Umum Kesthuri



313 PIHK
Rp478,17 miliar



Koperasi Perahu
USD 26.500

**FAKTA
PERSIDANGAN
KORUPSI
KUOTA HAJI**

Istri Yaqut hadir di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat sidang pembacaan dakwaan kasus korupsi alokasi kuota haji periode 2022-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (11/8/2026).ist

PRABOWO MINTA LABA DANANTARA JADI CADANGAN APBN

Presiden Prabowo Subianto meminta pengalihan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana ini muncul ketika sejumlah perusahaan negara yang berada di bawah pengelolaan Danantara mencatat pertumbuhan laba signifikan sepanjang semester I 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah belum menetapkan berapa besar kontribusi Danantara terhadap APBN 2027. Namun, Presiden Prabowo telah merencanakan sebagian keuntungan lembaga pengelola aset BUMN tersebut digunakan sebagai cadangan fiskal.

"Oh nggak ada, cuma gini, Danantara kan mengarahkan juga keuntungan kan. Presiden merencanakan sebagian keuntungan itu sebagai cadangan untuk APBN," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Purbaya belum memerinci besaran keuntungan Danantara yang akan dialokasikan untuk APBN. Pemerintah juga masih membahas mekanisme dan waktu penerapannya bersama Danantara.

"Nanti masih dibicarakan dengan Danantara," kata Purbaya.

Ia mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah kontribusi tersebut nantinya masuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), atau mekanisme lainnya.

"Nanti kita lihat, itu baru ide, jadi kontribusi Danantara ke saya yang saya tahu seperti itu," ujar dia.

Laba Melonjak

Rencana tersebut datang ketika kinerja sejumlah BUMN menunjukkan pertumbuhan laba yang cukup besar pada enam bulan pertama 2026.

PT Timah mencatat pertumbuhan laba paling tinggi. Perusahaan tambang pelat merah itu membukukan laba bersih Rp2,71 triliun pada semester I 2026, melonjak 804,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp300 miliar.

PT Pupuk Indonesia juga mencatat laba bersih Rp8,51 triliun, tumbuh 253 persen dibandingkan Rp2,41 triliun pada semester I 2025.

Di sektor semen, PT Semen Indonesia membukukan laba Rp193,46 miliar, meningkat 196,5 persen dari Rp65,24 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

PT Agrinas Palma Nusantara mencatat pertumbuhan laba 150

persen menjadi Rp890 miliar.

Kinerja positif juga terjadi pada sektor jasa keuangan dan logistik. PT Pegadaian membukukan laba Rp6,59 triliun, tumbuh 84,6 persen. PT Pelindo mencatat laba Rp2,57 triliun atau meningkat 60,4 persen.

PTPN IV PalmCo mencatat laba Rp3,23 triliun, naik 54 persen. Sementara Bank Tabungan Negara (BTN) membukukan laba Rp2,40 triliun, tumbuh 40,8 persen.

Bank Mandiri juga mencatat pertumbuhan laba sebesar 24,3 persen menjadi Rp30,41 triliun.

Di sektor energi bersih, PT Pertamina Geothermal Energy membukukan laba US\$79,61 juta, tumbuh 15,5 persen.

Sejumlah BUMN yang sebelumnya mencatat kerugian juga mulai membalikkan kinerja.

Krakatau Steel yang sebelumnya mengalami kerugian sekitar Rp1,74 triliun disebut berhasil berbalik mencatat laba sekitar Rp150 miliar-Rp185 miliar. Kimia Farma juga berbalik dari rugi Rp135,61 miliar menjadi laba Rp54,07 miliar.

Rangkaian angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja di berbagai sektor BUMN, mulai dari pertambangan, pupuk, semen, perkebunan, perbankan, jasa keuangan, pelabuhan hingga energi panas bumi.

Klaim Transformasi Mulai Terlihat

Managing Partner BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menilai kinerja sejumlah BUMN besar masih menunjukkan performa solid.

"Menurut saya kinerja solid masih ditunjukan BUMN blue chips yang sedari dulu menjadi motor penggerak revenue dan profit total BUMN. Misal kinerja Himbara di sektor perbankan, sektor mineral dan hasil tambang, sektor telco dan Pertamina," kata Toto di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurut Toto, kinerja BUMN masih memiliki ruang untuk meningkat seiring proses streamlining atau penataan dan konsolidasi perusahaan negara.

"Harapan saya supaya proses streamlining BUMN bisa dipercepat sehingga perbaikan kinerja bisa lebih cepat dilaksanakan," ujarnya.

Danantara memang menjadikan konsolidasi sebagai salah satu agenda

utama dalam pengelolaan BUMN. Penataan tersebut diarahkan untuk mengurangi tumpang tindih usaha, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat perusahaan negara berdasarkan sektor bisnisnya.

Kinerja Pupuk Indonesia, misalnya, menjadi salah satu contoh yang mencolok. Laba bersih perusahaan pada semester I 2026 mencapai Rp8,51 triliun, naik lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pelindo juga mencatat laba Rp2,57 triliun pada semester I 2026, naik sekitar 60 persen secara tahunan.

Kenaikan laba tersebut memperbesar basis keuntungan perusahaan-perusahaan negara yang menjadi bagian dari portofolio Danantara.

Revenue Naik 400 Persen

Prabowo sendiri sebelumnya mengklaim pendapatan Danantara meningkat tajam setelah sekitar satu tahun beroperasi.

Ia menyebut memperoleh laporan bahwa revenue Danantara meningkat hingga 400 persen.

"Kita juga tadi disinggung, dalam satu tahun beroperasi Danantara, saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengatakan angka tersebut masih perlu diperiksa dan diaudit.

"Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek, tapi walaupun tidak 400 persen, 300 persen, atau 200 persen, ini signifikan,

peningkatan signifikan dalam satu tahun bekerja," katanya.

Klaim itu memberikan konteks terhadap rencana pemerintah menjadikan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan APBN. Semakin besar laba yang dihasilkan dari aset yang dikelola, semakin besar pula potensi kontribusi yang dapat diberikan kepada negara.

Pemerintah sebelumnya telah memasang target kontribusi yang jauh lebih besar untuk Danantara.

Prabowo menargetkan Danantara mampu menghasilkan sekitar US\$50 miliar atau sekitar Rp800 triliun per tahun untuk negara.

Target tersebut berkaitan dengan nilai aset yang dikelola Danantara yang mencapai sekitar US\$1 triliun atau sekitar Rp17.000-Rp17.800 triliun. (wid isr, kim/dya)

PENCAPAIAN DANANTARA 2026



Aset kelolaan:

sekitar US\$1 triliun atau sekitar Rp17.000-17.800 triliun.



Target kontribusi:

ditargetkan menghasilkan sekitar Rp800 triliun per tahun untuk negara.



Revenue Danantara:

diklaim Presiden Prabowo naik hingga 400 persen dalam sekitar satu tahun operasi.



BENTUK TIM LINTAS KEMENTERIAN, DPR DESAK KONFLIK AGRARIA SEGERA DISELESAIKAN

Pemerintah mulai menyiapkan mekanisme lintas kementerian untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut di berbagai daerah. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bersama pimpinan DPR dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) membahas persoalan tersebut dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menyepakati pembentukan tim lintas kementerian untuk memetakan dan mengelompokkan berbagai persoalan agraria. Tim itu nantinya mencari jalan keluar berdasarkan karakter dan tingkat kerumitan masing-masing konflik.

"Jadi, kami menyepakati nanti kami dari pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian. Tadi ada beberapa kementerian yang kemudian dalam rapat juga akan dimasukkan ya sebagai tambahan, salah satunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman itu, untuk masuk dalam satu tim," kata Prasetyo usai rapat.

Menurut Prasetyo, tim tersebut ditargetkan segera bekerja untuk mengklusterisasi persoalan agraria. Dengan cara itu, kasus yang dapat diselesaikan melalui mekanisme kementerian terkait bisa didorong lebih cepat, sementara perkara yang lebih kompleks dapat ditangani melalui koordinasi lintas lembaga.

"Yang kemudian nanti targetnya secepatnya untuk mengkluster semua permasalahan agraria kita untuk dicarikan segera jalan keluarnya, gitu," ujar Prasetyo.

Ia mencontohkan persoalan sekitar 73 ribu hektare lahan yang secara fisik telah menjadi sawah, tetapi status tanahnya masih berada dalam kawasan hutan.

"Misalnya contoh sawah gitu ya, yang sekarang tadi disampaikan atau dilaporkan yang dirapatin ini ya, kurang lebih ada 73.000 hektar misalnya dalam bentuk sudah sawah, yang itu masih status tanahnya bisa apa masuk kawasan hutan misalnya,"



Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri) saat rapat koordinasi dengan pemerintah dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026). (antara)

kata Prasetyo.

Menurut dia, persoalan semacam itu dapat ditangani secara paralel melalui mekanisme yang telah tersedia di kementerian terkait.

"Nah, itu secara paralel diminta untuk juga diselesaikan dengan mekanisme yang sudah ada, yang tentunya kan di setiap kementerian, misalnya di ATR/BPN, kan, juga sudah ada mekanismenya," ujarnya.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Dari pemerintah hadir Prasetyo Hadi, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika juga menghadiri pertemuan tersebut.

Pertemuan digelar atas inisiatif Panitia Khusus Agraria DPR RI. Dasco

mengatakan penyelesaian konflik di lapangan tidak dapat menunggu sampai pemerintah dan DPR merampungkan desain besar kebijakan agraria.

"Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak," kata Dasco saat memimpin rapat.

Menurut Dasco, konflik agraria terus bermunculan sehingga membutuhkan penanganan segera.

"Nah oleh karena itu, kejadian demi kejadian di lapangan yang kemudian datang silih berganti, itu juga tidak bisa menunggu dan harus juga cepat diselesaikan," ujar dia.

Atas dasar itu, Pansus Agraria DPR mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk membahas sejumlah persoalan yang dinilai mendesak. KPA diminta memaparkan kasus-kasus yang membutuhkan penanganan segera.

Namun, Dasco mengatakan pembahasan harus difokuskan pada sejumlah kasus prioritas karena keterbatasan waktu.

"Tapi mohon maaf juga kalau karena keterbatasan waktu kita, kita juga batasi mungkin beberapa persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk kita segera selesaikan," ungkap dia.

Dasco berharap kehadiran para menteri dalam rapat tersebut tidak sekadar menghasilkan pembahasan, tetapi keputusan konkret terhadap kasus yang dibawa ke meja pertemuan.

"Mumpung nih ada nih, menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil

DATA KONFLIK AGRARIA 2025

341 konflik agraria terjadi sepanjang 2025

- Konflik meningkat sekitar 15% dibandingkan 2024.
- Konflik tersebar di 33 provinsi.
- Berdampak pada 123.612 keluarga.
- Konflik terjadi di 428 desa/kelurahan.
- Total lahan yang terdampak mencapai sekitar 914,5 ribu hektare.

Sektor dengan konflik terbesar

- Perkebunan: 135 konflik, 352.156,41 ha, 8.734 keluarga terdampak.
- Kehutanan: sekitar 435.439,80 ha lahan terdampak.
- Pertambangan: 46 konflik, 58.904,68 ha, 11.020 keluarga terdampak.

Data prioritas KPA

- 865 lokasi menjadi prioritas reforma agraria.
- Total luas lokasi prioritas sekitar 1,7 juta hektare.
- Data tersebut dihimpun bersama 135 organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat.



keputusan pada saat ini dan kita bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kita sepakati di sini," kata Dasco.

Dalam rapat itu, KPA membawa daftar lokasi yang dinilai membutuhkan penyelesaian melalui reforma agraria. KPA menyebut telah menyerahkan data 865 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dengan total luas sekitar 1,7 juta hektare kepada pimpinan DPR.

Data tersebut disusun bersama 135 organisasi tani, nelayan, dan masyarakat adat yang tergabung dalam KPA.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut atas data lokasi prioritas yang sebelumnya telah disampaikan.

"Kami sebenarnya menunggu progres dari sejak KPA menyerahkan 865 lokasi prioritas reforma agraria," ujar Dewi. (tin,ist,rls,kum/dya)

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kiri) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kedua kanan), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri) dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (kanan) mengikuti rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026). (antara)



BURSA KETUM PBNU: GUS YAHYA, PAMAN CAK IMIN HINGGA MENAG NASARUDDIN

Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghangat menjelang Muktamar ke-35 NU. Sejumlah nama mulai disebut masuk dalam bursa, dari petahana Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, sejumlah pengasuh pesantren, hingga Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Wakil Ketua Steering Committee Muktamar ke-35 NU, Ulil Absar Abdalla, menyebut sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Mereka antara lain Gus Yahya, Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, Abdul Ghofar Rozin atau Gus Rozin, Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Zulfa Mustofa, dan Nasaruddin Umar.

"Selain Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf, ada Gus Salam (Abdussalam Shohib, Gus Yusuf Chudlori, Gus Rozin (Abdul Ghofar Rozin), Gus Kikin (Abdul Hakim Mahfudz) ada Kiai Zulfa Mustofa," kata Gus Ulil, Selasa (11/8/2026).

Gus Yahya merupakan petahana yang telah menyatakan akan kembali maju dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Ia sebelumnya mengatakan siap kembali mencalonkan diri pada Muktamar ke-35 NU.

Sementara itu, Gus Salam merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang. Ia juga dikenal sebagai paman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Nama lain yang menjadi perhatian adalah Nasaruddin Umar. Menteri Agama itu disebut masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU, meski persoalan statusnya sebagai menteri membuat pencalonannya berhadapan dengan aturan internal organisasi.

Nasaruddin Didorong Senior

Berbeda dengan Gus Yahya yang telah menyatakan maju, Nasaruddin belum pernah mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU.

Nasaruddin justru mengaku mendapat dorongan dari sejumlah senior dan sahabat di lingkungan NU untuk maju.

"Saya terus terang per hari ini belum pernah menyatakan deklarasi atau apa pun, tapi banyak senior, teman-teman, para suhu, baik para sahabat, sampai menyatakan begini: ketika Anda diminta NU lantas menolak, itu pertanda egois, itu zalim. Anda dibesarkan oleh NU, giliran NU



Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengecek langsung sejumlah persiapan di Universitas KH. A. Wahab Hasbullah (Unwaha), Jombang, Senin, 10 Agustus 2026.

meminta Anda, Anda mencari zona nyaman," kata Nasaruddin dalam Diskusi Panel Silatnas MA IPNU di Jakarta.

Menurut Nasaruddin, dorongan tersebut merupakan amanah yang perlu dipertimbangkan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan peserta Muktamar.

"Bagi saya berkesan. Jadi ketika

kita diminta oleh para senior, oleh orang, maka kita sebagai kader harus bersedia. Tapi dengan catatan bahwa siapa pun nanti yang akan diterima muktamirin, maka kita harus menerima," ujarnya.

Sikap tersebut membuat posisi Nasaruddin berbeda dengan kandidat yang sudah menyatakan kesiapan maju. Di sisi lain, namanya tetap

diperhitungkan dalam bursa karena rekam jeaknya di NU dan posisinya sebagai Menteri Agama.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya juga memasukkan Nasaruddin dalam daftar nama yang disebut-sebut berpeluang maju bersama Gus Yahya, Zulfa Mustofa, Gus Yusuf Chudlori, Gus Salam Shohib, dan Gus Kikin.

Masuknya Nasaruddin dalam bursa sekaligus membuka persoalan mengenai aturan rangkap jabatan di tubuh NU.

Ulil mengatakan Nasaruddin masih terkendala aturan AD/ART PBNU yang mengharuskan Ketua Umum tidak merangkap jabatan politik.

"Pak Nasar (Menteri Agama Nasaruddin Umar) juga termasuk dalam bursa calon," kata Gus Ulil.

"Jadi kalau misalnya pasal ini masih berlaku, maka Pak Nasar tidak bisa, karena Ketua Umum tidak bisa merangkap sebagai menteri," ucapnya. (gus,rls,nu/dya)

Musyawahar AHWA Digelar di Rumah Mbah Wahab

MUSYAWARAH Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar di Ndalem Kasepuhan KH Abdul Wahab Chasbullah (Mbah Wahab), yang berada di kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Pemilihan rumah salah satu pendiri NU itu mempertimbangkan nilai sejarah dan spirit perjuangan Mbah Wahab dalam mendirikan serta membesarkan NU.

Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq, mengatakan lokasi AHWA semula direncanakan di area makam Mbah Wahab. Namun, rencana itu dipindahkan karena kawasan makam diperkirakan ramai oleh peziarah dan pengunjung selama Muktamar.

"Memang awalnya kita punya wacana ditempatkan di area makam. Tapi karena di situ area keramaian, jadi kita geser ke Ndalem KH Wahab Chasbullah," kata Gus Rozaq.

Menurut dia, pemilihan Ndalem Kasepuhan juga diharapkan membuat musyawarah berlangsung lebih kondusif dan teduh.

"Ini sekaligus untuk mengenang awal perjuangan Kiai Wahab mendirikan NU yang memang berawal dari rumah tersebut," ujarnya.

AHWA merupakan forum yang beranggotakan sembilan ulama sepuh. Mereka akan bermusyawahar menentukan ulama yang dinilai mampu mengemban amanah sebagai Rais Aam PBNU untuk masa khidmah berikutnya.

Pada Muktamar ke-34 NU di

Bandarlampung, sembilan ulama sepuh anggota AHWA dipilih berdasarkan urutan suara terbanyak dari nama-nama yang diusulkan PCNU dan PWNU se-Indonesia.

Mereka adalah KH Dimiyati Rois, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, TGH Turmudzi Badaruddin, KH Miftachul Akhyar, KH Nurul Huda Jazuli, KH Ali Akbar Marbun, dan KH Zainal Abidin.

Sistem AHWA digagas untuk menjaga martabat, wibawa, dan muruah para kiai sepuh. Gagasan itu muncul setelah evaluasi terhadap sistem pemilihan Rais Aam secara terbuka pada Muktamar ke-32 NU di Makassar. (gus,ist/dya)

**5 PROVINSI PRIORITAS
PENANGANAN KARHUTLA
NASIONAL 2026**



Kalimantan Barat

Luas kebakaran mencapai 28.680,47 hektare



Riau

Luas kebakaran mencapai 15.477,95 hektare



Nusa Tenggara Timur (NTT)

Luas kebakaran mencapai 10.538,30 hektare



Maluku

Luas kebakaran mencapai 7.091,07 hektare



Papua Selatan

Luas kebakaran mencapai 6.281,81 hektare

(Laporan resmi BNPB per Agustus 2026)

GILIRAN KEBAKARAN GUNUNG GEDE YANG MELUAS

Saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bromo belum berhasil dipadamkan penuh, giliran api di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Jawa Barat, meluas hingga sekitar 20 hektare. Api terpantau di dua lokasi, yakni Sabana Alun-alun Suryakencana dan Kawah Wadon. Sementara hingga Selasa, (11/8/2026) luas wilayah terdampak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mencapai 899 hektare.



Petugas berusaha melakukan pemadaman kebakaran lahan di sekitar Kawah Wadon, kawasan Gunung Gede kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), sejak Jumat (7/8/2026). (Dok.Kemenhut)

Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengatakan kebakaran diduga dipicu faktor alam dan manusia. Petugas gabungan bersama relawan masih melakukan pemadaman agar api tidak terus meluas.

"Hasil assessment luasan yang terbakar mencapai 20 hektare. Petugas gabungan dan relawan masih berupaya lakukan penanganan agar tidak terus meluas," kata Wahyu.

Pemerintah daerah, kata dia, akan menindak tegas apabila kebakaran menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun pemerintah.

Wahyu juga mengimbau masyarakat tidak membakar lahan sembarangan dan membuang puntung rokok. Warga diminta segera melapor apabila menemukan indikasi kebakaran.

"Terpenting adalah mencegah hal-hal yang bisa kita cegah. Termasuk juga menjaga alam yang saat ini sudah menjaga kita, menjaga pohon-pohon yang sudah menjaga kita, jangan kemudian ditebang," ujarnya.

Menurut Wahyu, menjaga tutupan pohon penting karena ketersediaan air turut menentukan efektivitas pemadaman.

"Karena kita ingin memadamkan, tetapi airnya tidak ada, itu percuma. Jadi, jaga pohon kita agar lahan kita bisa lebih aman."

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi mengatakan 700 personel gabungan disiagakan untuk penanganan karhutla di wilayah Cianjur.

Petugas juga menggunakan alat pemadam manual bernama gepyok yang terbuat dari rotan. Alat itu dipilih karena ringan dibawa ke kawasan puncak.

"Alatnya, Gepyok. Terbuat dari rotan, selain ringan untuk dibawa ke

puncak. Alat ini juga dinilai efektif untuk memadamkan kobaran api," kata Alexander.

Menurutnya, penggunaan APAR memiliki keterbatasan karena berat dibawa ke lokasi dan kapasitasnya terbatas sehingga harus diisi ulang.

"Semua unsur terlibat, ada sebanyak 700 personel gabungan yang disiagakan. Mereka siap bergerak saat terjadi karhutla. Termasuk, yang saat ini masih melakukan penanganan di kawasan TNGGP," ujarnya.

Di Bromo Hampir 900 Hektare

Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus meluas. Hingga Selasa, 11 Agustus 2026, luas wilayah terdampak dilaporkan mencapai 899 hektare.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan operasi water bombing kembali dilakukan untuk menahan rambatan api. Pemadaman udara difokuskan di kawasan Dingklik, Pasuruan, dan P30, Probolinggo.

"Water bombing sedang dilaksanakan di Dingklik Pasuruan dan P30 Probolinggo. Kondisi saat ini wilayah

Bromo berkabut. Luas wilayah terdampak 899 hektare akibat kebakaran dari awal hingga tadi malam," kata Gatot.

Namun, operasi dari udara belum berjalan maksimal. Sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran, angin kencang, perubahan cuaca, serta medan yang curam menjadi kendala.

"Sumber air jauh, angin kencang dan cuaca yang mudah berubah-ubah, curam topografinya dan banyaknya bahan bakar berupa ilalang dan sarasah yang sangat kering dan mudah terbakar," ujarnya.

Pemadaman kemudian diperkuat dari jalur darat. Tim gabungan mengerahkan dua truk pemadam kebakaran, dua truk tangki, satu kendaraan L300 bermuatan tandon air, dan satu unit drone water spray.

Kepala BNPB dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) juga datang ke posko penanganan kebakaran Bromo untuk memberikan arahan.

Gatot mengatakan personel TNI, Polri, dan tim terkait akan diperkuat untuk mendukung pemadaman dari darat sekaligus operasi water bombing.

"Saat ini Bapak Kaban BNPB dan Pak Menko PMK hadir di posko penanganan kebakaran di Bromo memberikan arahan, termasuk untuk memaksimalkan personel dari TNI dan Polri serta tim terkait guna penguatan tim darat, serta berupaya maksimal untuk water bombing," katanya.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah mencapai sekitar 107.000 hektare hingga Agustus 2026. Di tengah meluasnya kebakaran, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamar Chaniago memperingatkan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Djamar mengatakan keberhasilan pengendalian karhutla akan menjadi salah satu pertimbangan terhadap perkembangan karier para Pangdam dan Kapolda. Ia menyebut kebijakan mutasi bagi pejabat daerah yang dinilai gagal menangani karhutla masih berlaku.

Menurut Djamar, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden ke-7 Joko Widodo dan telah disampaikan kepada para Pangdam serta Kapolda ketika melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. (wid,ist/dya)

Sekolah di Kota Malang Kekurangan Ratusan Guru Kelas



Ilustrasi: SDN Kebonsari 2, Kecamatan Sukun, Kota Malang menjadi salah satu sekolah yang kekurangan jumlah guru kelas, Selasa (11/8/2026). (Santi/Lentera)

MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mengakui saat ini kekurangan ratusan guru kelas. Walhasil, sekolah-sekolah memutar otak untuk mengatasi masalah krusial tersebut agar proses pembelajaran tetap berjalan.

Guru Kelas 5B SDN Kebonsari 2, Sulistyowati, S.Pd, mengatakan

sekolahnya saat ini memiliki 18 rombongan belajar (rombel). Sementara jumlah guru kelas atau wali kelas yang tersedia hanya 16 orang. "Memang kami kekurangan guru kelas, total kelas kami ada 18, sedangkan guru kelas ada 16," ujar Sulistyowati, ditemui pada Selasa (11/8/2026).

Dijelaskan, sekolah memiliki sekitar 6 guru mata pelajaran (mapel). Jumlah tersebut terdiri dari 3 guru Pendidikan Agama dan 3 guru olahraga. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat sekitar 22 guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Namun, karena terdapat kekurangan guru kelas, untuk sementara tenaga guru olahraga ditempatkan untuk membantu

mengisi tugas guru kelas. Penataan tersebut dilakukan agar seluruh kelas tetap mendapatkan pendampingan selama proses pembelajaran. "Nanti kalau ada PPPK masuk, baru kami kembalikan ke porsinya," jelasnya.

Sulistyowati mengatakan, kondisi kekurangan guru tersebut telah berlangsung hampir satu semester. Sekolah pun berupaya memastikan siswa tetap mendapatkan pembelajaran dengan menempatkan guru yang dapat standby ketika dibutuhkan.

"Sehingga sejak semester yang lalu itu bagaimana caranya kami supaya anak-anak istilahnya tidak terbengkalai, kami usahakan ada guru yang standby," katanya.

Persoalan tersebut diakui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang. Kabid Pembinaan Ketenagaan Dikbud Kota Malang, Ganis Indah Yani, menyebut kebutuhan guru di Kota Malang masih cukup besar.

"Memang guru di Kota Malang ini masih banyak kekurangan. Secara

Dapodik itu kami kurangnya sekitar 60-70, itu GTT yang terdaftar di Dapodik. Itu guru honorer," ujar Ganis, ditemui di Kantor Disdikbud Kota Malang.

Dijelaskannya, khusus untuk guru kelas, kebutuhan tenaga pendidik disebut mencapai sekitar 100 orang pada jenjang SD dan SMP. "Kalau guru kelas kurangnya sekitar 100-an, SD-SMP. Banyak," katanya.

Di sisi lain, sekolah menghadapi keterbatasan untuk memenuhi kekurangan tersebut melalui tenaga honorer. Ganis mengatakan, sejak 2023 terdapat kebijakan yang tidak memperbolehkan penambahan Guru Tidak Tetap (GTT).

Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan setelah penggunaan anggaran daerah untuk membayar guru honorer juga tidak lagi dapat dilakukan. Ganis menyebut, sejak 2025, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tidak dapat digunakan untuk membayar guru honorer. (Santi/Dya)

Kekeringan, BPBD Malang Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat di 20 Desa

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang telah melakukan asesmen di 20 desa rawan kekeringan yang tersebar di 8 kecamatan. Hasilnya menjadi dasar status bencana kekeringan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Penetapan akan dibahas dalam rapat koordinasi pada Kamis (13/8/2026).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengatakan, asesmen dilakukan sejak Senin (3/8/2026) di 8 kecamatan yang masuk dalam wilayah berpotensi mengalami kekeringan. Delapan kecamatan tersebut, yakni Sumbermanjing Wetan, Pagak, Gedangan, Kalipare, Bantur, Donomulyo, Sumberpucung, dan Kasembon.

"Memang dari beberapa desa yang kami lakukan asesmen ada yang kering, ada yang sampai saat ini belum kering karena sudah ada saluran distribusi air dari PDAM," ujar Sadono, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (11/8/2026).

Berdasarkan data wilayah dengan

potensi ancaman bencana kekeringan, disebutkannya, Kecamatan Bantur tercatat memiliki jumlah kepala keluarga (KK) terbesar. Sebanyak 675 KK di Dusun Krajan, Desa Bandungrejo, masuk dalam daftar wilayah berpotensi terdampak.

Selanjutnya, Kecamatan Sumberpucung mencatat 496 KK di Dusun Karangates, Desa Sumberpucung.

Di Kecamatan Kalipare, wilayah yang masuk dalam daftar meliputi Dusun Krajan 1, Desa Putukrejo sebanyak 426 KK; Desa Kalipare sebanyak 380 KK; Dusun Tumpakmiri, Desa Arjosari sebanyak 230 KK; Dusun Kampungbaru, Desa Sukowilangun sebanyak 170 KK; serta Dusun Pondo Kobong, Desa Sumberpetung sebanyak 275 KK.

Sementara di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, wilayah yang masuk dalam daftar meliputi Desa Harjokuncaran, Sumberagung, Sitiarjo, Kedungbanteng, dan Klepu. Jumlah KK yang tercatat antara lain 241 KK di Dusun Mulyosari, 142 KK di Dusun Krajan, 130 KK di Dusun Krajan

Kulon, 283 KK di Dusun Krajan, serta 250 KK di Dusun Klepu.

Di Kecamatan Gedangan, potensi kekeringan mencakup Desa Segaran, Gajahrejo, dan Tumpakrejo dengan masing-masing 375 KK, 112 KK, dan 156 KK pada wilayah yang tercantum dalam data.

Kemudian Kecamatan Pagak mencatat 245 KK di Dusun Krajan, Desa Pagak. Kecamatan Donomulyo mencakup Desa Sumberoto dan Mentaraman dengan masing-masing 125 KK di Dusun Gondangrejo dan 40 KK di Dusun Kalisangkrah.

"Sedangkan Kecamatan Kasembon tercatat sebanyak 189 KK di Dusun Sukosari, Desa Sukosari," katanya.

Sadono menjelaskan, kondisi kekeringan pada 2026 juga menunjukkan adanya perubahan peta dibandingkan 2023 dan 2024. Perubahan tersebut salah satunya



Arsip: Petugas BPBD Kabupaten Malang menyalurkan distribusi air bersih di salah satu wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Malang. (foto: Pusdalops PB BPBD Kab. Malang)

dipengaruhi oleh adanya saluran distribusi air dari PDAM ke sejumlah wilayah.

Karena itu, tidak seluruh desa yang masuk dalam data potensi kekeringan saat ini mengalami kondisi kering. Hasil asesmen BPBD digunakan untuk memastikan kondisi faktual di lapangan sekaligus menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. (Santi/Dya)

MANTAN PRESIDEN SURIAH BASHAR AL-ASSAD DIVONIS MATI

Pengadilan Suriah menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Presiden Bashar al-Assad pada Selasa (11/8/2026). Vonis dijatuhkan secara in absentia setelah Assad dinyatakan bersalah atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang saudara Suriah. Putusan tersebut menjadi salah satu langkah paling signifikan dalam proses peradilan transisi Suriah setelah rezim Assad tumbang pada Desember 2024.

Pemerintah baru Suriah mulai membawa sejumlah tokoh rezim sebelumnya ke meja hijau, baik melalui persidangan langsung maupun in absentia.

Assad tidak hadir dalam persidangan. Ia melarikan diri bersama keluarganya ke Moskow, Rusia, setelah pemerintahannya runtuh pada 8 Desember 2024. Assad sebelumnya berkuasa selama hampir 25 tahun setelah menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad.

Pengadilan menyatakan akan mengejar Assad secara internasional untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang didakwakan kepadanya.

Meski vonis telah dijatuhkan, pelaksanaannya menghadapi persoalan besar karena Assad berada di Rusia.

Artinya, hukuman mati tersebut untuk saat ini bergantung pada kemungkinan Assad dipulangkan atau ditangkap dan diserahkan kepada otoritas Suriah. Pemerintah Suriah sebelumnya telah secara terbuka meminta agar Rusia dan negara-negara lain menyerahkan Assad untuk menjalani proses hukum.

Selain Bashar, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada adiknya, Maher al-Assad.

Maher dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, penyiksaan, dan penghasutan. Ia merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di era pemerintahan kakaknya dan sebelumnya memimpin Divisi Keempat Angkatan Darat Suriah.

Vonis terhadap kedua bersaudara itu dijatuhkan ketika keduanya berada di luar Suriah.

Pemerintah Suriah sebelumnya telah menegaskan keinginannya agar Assad dan orang-orang yang terkait dengan rezimnya dipulangkan untuk menghadapi proses hukum. Menteri Kehakiman Suriah Mazhar al-Wais pada Februari 2026 mengatakan pemerintah tidak akan memberikan pengampunan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan berat terhadap rakyat.

"Tidak ada seorang pun yang terlibat dalam penumpahan bahkan setetes darah rakyat Suriah yang akan dibebaskan," kata al-Wais.

Ia mengatakan proses peradilan transisi diarahkan untuk menghindari dua ekstrem: impunitas dan balas



Seorang anggota mantan kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham berjaga di dekat gambar Bashar al-Assad dari Suriah di markas besar Divisi Keempat di Damaskus, Suriah, 23 Januari 2025. (dok.reuters)

dendam. Pemerintah, menurut dia, akan mengejar para pelaku melalui jalur hukum yang dianggap sah secara internasional.

Pengadilan juga menjatuhkan hukuman mati kepada Atif Najib, sepupu Bashar al-Assad yang pernah menjadi kepala keamanan politik di Provinsi Daraa.

Daraa merupakan wilayah yang menjadi titik awal pemberontakan terhadap pemerintahan Assad pada 2011. Penindasan terhadap demonstrasi di wilayah tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu berkembangnya konflik yang berubah menjadi perang saudara berkepanjangan.

Najib ditangkap pada Januari 2025. Pengadilan menyatakan dia bersalah atas sejumlah kejahatan, antara lain pembunuhan, pembunuhan disengaja terhadap anak-anak berusia di bawah 15 tahun, serta penyiksaan yang menyebabkan kematian.

Tindakan tersebut dikategorikan pengadilan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan".

"Bentuk hukuman terberat terhadapnya, yaitu hukuman mati," kata pengadilan ketika membacakan putusan.

Najib merupakan salah satu pejabat era Assad yang menghadapi persidangan secara langsung. Persidangan terhadap pejabat rezim lama sendiri telah menjadi bagian dari agenda peradilan transisi yang mulai berjalan di Damaskus sejak 2026.

Rekam Jejak Kejahatan Rezim Assad

Vonis terhadap Assad tidak berdiri sendiri. Selama bertahun-tahun, pemerintahannya menghadapi tuduhan pelanggaran HAM berat, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan di luar hukum, hingga penggunaan senjata kimia.

Komisi Penyelidikan Independen Internasional PBB untuk Suriah sebelumnya menyimpulkan bahwa praktik penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan paksa yang dilakukan secara sistematis oleh rezim sebelumnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Kesimpulan tersebut didasarkan antara lain pada lebih dari 2.000 kesaksian, termasuk lebih dari 550 wawancara dengan penyintas penyiksaan.

Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian internasional adalah serangan senjata kimia di Ghouta pada Agustus 2013. Pengadilan Prancis pada 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Assad terkait dugaan keterlibatannya dalam serangan tersebut.

Pengadilan Prancis kemudian mempertahankan surat perintah itu setelah menolak keberatan yang menyatakan Assad memiliki kekebalan sebagai kepala negara. Dalam kasus tersebut, Maher al-Assad dan sejumlah pejabat senior rezim juga menjadi sasaran surat perintah penangkapan.

Jatuhnya Assad pada akhir 2024 membuka fase baru bagi Suriah, tetapi sekaligus meninggalkan persoalan besar tentang bagaimana negara itu menangani kejahatan selama perang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya menyebut pembukaan persidangan terhadap Assad dan tokoh rezimnya sebagai langkah penting menuju pertanggungjawaban. Namun, Kantor HAM PBB juga menekankan bahwa para terdakwa yang diadili secara in absentia pada akhirnya perlu menghadapi pengadilan secara langsung. (tin,rls,ret/dya)

TIMELINE BASHAR AL-ASSAD HINGGA DIVONIS MATI

- **2000 — Berkuasa**
Bashar al-Assad menjadi Presiden Suriah setelah ayahnya, Hafez al-Assad, wafat.
- **2011 — Perang Saudara**
Demonstrasi di Deraa direpresi pemerintah dan berkembang menjadi perang saudara.
- **2013 — Tragedi Ghouta**
Serangan gas sarin menewaskan 1.400+ warga sipil. Pemerintahan Assad dituding bertanggung jawab.
- **2015 — Rusia & Iran Turun Tangan**
Dukungan Rusia, Iran, dan Hizbullah memperkuat posisi rezim Assad.
- **27 Nov-5 Des 2024 — Rezim Runtuh**
HTS dan oposisi merebut Aleppo, Hama, dan Homs.
- **8 Des 2024 — Assad Tumbang**
Damaskus jatuh. Kekuasaan keluarga Assad selama 53 tahun berakhir. Bashar melarikan diri ke Moskow.
- **2025 — Perburuan Rezim Lama**
Pemerintahan transisi mulai menangkap pejabat rezim Assad.
- **4 Agustus 2026 — Dituntut Mati**
Jaksa menuntut hukuman mati bagi Bashar, Maher al-Assad, dan sejumlah pejabat keamanan.
- **11 Agustus 2026 — DIVONIS MATI**
Bashar al-Assad divonis mati secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan berencana, dan penyiksaan sistematis. Maher al-Assad dan Atef Najib juga divonis mati.



Soal Bau Badan, Pahami Beda Deodorant dan Antiperspirant

Cuaca panas dan aktivitas padat sering membuat ketiak lebih mudah berkeringat. Masalahnya, keringat berlebih bukan hanya menimbulkan rasa lengket dan tidak nyaman, tetapi juga dapat memicu munculnya bau badan ketika bercampur dengan bakteri di permukaan kulit.

Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mengandalkan deodorant. Namun, tahukah kamu bahwa deodorant dan antiperspirant sebenarnya memiliki fungsi berbeda?

Keduanya memang sama-sama digunakan pada area ketiak dan tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari spray, bubuk, gel, lotion hingga roll-on. Namun, pilihan produk sebaiknya disesuaikan dengan persoalan yang ingin diatasi yaitu bau badan atau produksi keringat yang berlebihan.

Cleveland Clinic menjelaskan, deodorant ditujukan untuk mengatasi bau badan, sedangkan antiperspirant bekerja mengurangi jumlah keringat. Keduanya juga dapat membantu mengurangi bau, tetapi melalui mekanisme yang berbeda.

Mengatasi Bau Vs Mengurangi Keringat

Pembedaan paling mendasar terletak pada manfaat utamanya. Deodorant bekerja terutama untuk mengendalikan bau badan. Produk ini tidak menghentikan produksi keringat. Kandungannya dapat berupa bahan antimikroba yang membantu mengurangi bakteri

penyebab bau, sekaligus pewangi untuk menutupi aroma yang tidak sedap.

Hal ini penting karena keringat sebenarnya bukan sumber utama bau badan. Cleveland Clinic menjelaskan bahwa keringat pada dasarnya tidak berbau. Bau muncul ketika keringat berinteraksi dengan bakteri yang terdapat secara alami di kulit.

Sementara itu, antiperspirant dirancang untuk mengurangi produksi keringat. Produk ini umumnya menggunakan senyawa berbasis aluminium sebagai bahan aktif. Senyawa tersebut bekerja pada saluran keringat sehingga aliran keringat ke permukaan kulit berkurang.

Karena jumlah keringat berkurang, kelembapan di area ketiak juga ikut berkurang. Kondisi ini pada akhirnya dapat membantu mengurangi bau badan.

American Academy of Dermatology Association (AAD) bahkan secara tegas membedakan keduanya. Antiperspirant membantu mengurangi keringat, sementara deodorant tidak. Deodorant ditujukan untuk mengatasi atau menutupi bau badan.

Jika persoalan utamanya adalah bau badan tetapi produksi keringat masih tergolong normal, deodorant bisa menjadi pilihan.

Deodorant bekerja dengan membantu mengendalikan bakteri penyebab bau dan memberikan aroma tambahan. Produk ini tidak dirancang untuk menghentikan keringat.

Dengan kata lain, memakai deodorant bukan berarti ketiak tidak akan berkeringat. Fungsinya lebih kepada membuat bau badan tetap terkendali.

Dan ini penting untuk dipahami karena berkeringat sebenarnya merupakan proses normal tubuh. Keringat membantu tubuh mengatur suhu, terutama ketika cuaca panas atau saat melakukan aktivitas fisik.

Tapi jika masalah utama adalah keringat berlebih, antiperspirant lebih sesuai.

American Academy of Dermatology menyebut antiperspirant sebagai salah satu cara utama untuk membantu mengatasi keringat berlebih atau hyperhidrosis.

Produk yang dijual bebas dapat membantu kasus ringan, sedangkan sebagian orang dengan kondisi lebih berat mungkin membutuhkan antiperspirant dengan resep atau penanganan dermatologis lainnya.

Mayo Clinic juga menyebut antiperspirant yang mengandung aluminium chloride dapat membantu mengatasi hyperhidrosis ringan. Produk tersebut umumnya digunakan pada kulit kering sebelum tidur dan dicuci pada pagi hari.

Selain produk, pemilihan pakaian juga dapat membantu. Dermatolog menyarankan pakaian yang memungkinkan sirkulasi udara, seperti bahan yang lebih breathable.

Pakaian yang terlalu ketat atau bahan sintetis tertentu dapat membuat panas dan kelembapan lebih terperangkap.

Kapan Sebaiknya Digunakan?

Meski sama-sama dapat digunakan dalam rutinitas perawatan tubuh, waktu pemakaian antiperspirant dan deodorant bisa berbeda. Untuk deodorant, penggunaannya relatif fleksibel. Produk dapat digunakan pada kulit yang bersih sesuai kebutuhan, misalnya setelah mandi pada pagi hari atau sebelum beraktivitas.

Sementara itu, antiperspirant justru sering bekerja lebih optimal ketika digunakan pada malam hari sebelum tidur, terutama pada kulit yang benar-benar kering.

AAD merekomendasikan antiperspirant diaplikasikan sebelum tidur pada kulit kering. Setelah produksi keringat terkendali, frekuensi pemakaian biasanya dapat dikurangi sesuai kebutuhan.

Cleveland Clinic juga menjelaskan bahwa pada banyak jenis antiperspirant, pemakaian malam hari memungkinkan produk berada di kulit selama sekitar enam hingga delapan jam ketika produksi keringat berada pada tingkat lebih rendah.

Namun, penggunaan produk tidak berarti bebas dari risiko iritasi. Deodorant maupun antiperspirant dapat menyebabkan iritasi, terutama jika mengandung pewangi atau pewarna tertentu.

Risiko tersebut juga dapat meningkat apabila produk langsung digunakan setelah mencukur bulu ketiak ketika kulit masih mengalami iritasi. (far,ist/dya)

Tak Perlu Pagar, AI Gembalakan Sapi di Selandia Baru

Peternakan sapi identik dengan pagar, padang rumput luas, serta peternak yang harus turun langsung menggiring kawanan ketika waktunya berpindah area. Namun, teknologi kini mulai mengubah cara tersebut.

Startup agritech asal Selandia Baru, Halter, mengembangkan sistem virtual fencing yang memungkinkan peternak mengendalikan pergerakan sapi tanpa harus memasang pagar fisik. Teknologi ini menggabungkan GPS, kecerdasan buatan (AI), sensor, aplikasi ponsel, hingga konektivitas satelit.

Sistem tersebut menggunakan kalung pintar yang dipasang pada setiap sapi. Melalui aplikasi, peternak dapat membuat batas area penggembalaan secara digital. Batas itu kemudian menjadi semacam "pagar tak kasatmata" yang dipahami sapi melalui sinyal dari kalung.

Menurut Halter, kalung tersebut menggunakan GPS untuk melacak lokasi dan perilaku sapi selama 24 jam. Sistem kemudian memanfaatkan suara dan getaran sebagai petunjuk agar sapi tetap berada di area yang ditentukan atau berpindah ke padang rumput berikutnya.

Artinya, ketika kawanan hendak dipindahkan, peternak tidak perlu datang langsung ke padang rumput. Cukup melalui ponsel, batas area dapat diubah dan perintah diberikan dari jarak jauh.

Sapi Dilatih Pahami Suara dan Getaran

Teknologi Halter tidak serta-merta membuat sapi memahami batas virtual. Hewan terlebih dahulu dilatih

sekitar tujuh hingga 10 hari untuk mengenali berbagai sinyal dari kalung. Untuk mengarahkan sapi, suara dari sisi kanan atau kiri kalung berfungsi sebagai petunjuk arah. Ketika sapi mengabaikan suara tersebut dan melewati batas virtual, sistem dapat memberikan pulsa listrik berenergi rendah sebagai koreksi.

Halter menyebut energi pulsa tersebut hanya sekitar sepersepuluh dari batas maksimum yang ditetapkan untuk pagar listrik konvensional.

Teknologi yang membuat sistem tersebut dapat "mempelajari" perilaku sapi disebut Halter sebagai The Cowgorithm.

Algoritma tersebut dirancang untuk memahami perilaku hewan sekaligus secara otomatis melatih sapi agar merespons petunjuk suara dari kalung.

Halter menjelaskan bahwa Cowgorithm dibangun menggunakan machine learning dan data perilaku ternak dalam jumlah sangat besar. Di situs resminya, perusahaan menyebut telah mengumpulkan lebih dari 7 miliar jam data perilaku hewan. Di balik kalung tersebut terdapat sistem pengumpulan data yang sangat besar.

Menurut Halter, setiap kalung dapat mengumpulkan dan mengirim lebih dari 6.000 titik data setiap menit ke platform berbasis cloud. Informasi tersebut mencakup lokasi, perilaku, serta kondisi ternak.

Halter juga mengembangkan konsep digital twin untuk peternakan. Teknologi ini memberikan gambaran kondisi peternakan secara langsung



melalui aplikasi, termasuk lokasi sapi, pola penggembalaan, dan riwayat aktivitas di setiap area.

Data tersebut tidak hanya digunakan untuk mengetahui posisi sapi. Sistem Halter juga dirancang untuk memantau perilaku, mendeteksi kemungkinan sapi sakit, serta membantu memperkirakan kondisi padang rumput menggunakan data satelit dan cuaca.

Dengan informasi tersebut, peternak dapat membagi lahan menjadi area penggembalaan yang lebih kecil dan memindahkan kawanan lebih sering. Menurut Halter, cara tersebut dapat membantu meningkatkan

pemanfaatan rumput sekaligus menjaga tekanan penggembalaan agar lebih konsisten.

Pakai Satelit Salah satu perkembangan terbaru teknologi Halter adalah penggunaan jaringan satelit. Pada April 2026, Halter memperkenalkan konektivitas direct-to-satellite untuk kalung sapi melalui kerja sama dengan One NZ Satellite yang memanfaatkan jaringan Starlink.

Dalam pengumuman resminya, Halter mengatakan konektivitas satelit memungkinkan peternak mengelola sapi di lokasi mana pun selama kalung memiliki pandangan ke langit. Teknologi itu dirancang untuk mengatasi keterbatasan konektivitas yang sebelumnya menjadi hambatan penerapan virtual fencing. (far/ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Warna Lipstik agar Tampak Lebih Segar

Nude Pink hingga Soft Berry

Lipstik sering menjadi langkah sederhana yang mampu mengubah keseluruhan tampilan wajah. Tanpa harus menggunakan riasan tebal, satu sapuan warna pada bibir dapat membuat wajah terlihat lebih hidup, cerah, bahkan tampak lebih segar.

Sebaliknya, warna yang kurang sesuai bisa membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Namun, tidak ada satu warna lipstik yang otomatis cocok untuk semua orang. Warna kulit, undertone, intensitas warna lipstik, hingga pencahayaan dapat memengaruhi hasil akhirnya.

American Academy of Dermatology Association (AAD) menjelaskan bahwa warna kulit dan karakteristik kulit setiap orang berbeda. Karena itu, pemilihan produk kosmetik sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan kulit masing-masing, bukan hanya mengikuti tren.

Jika ingin mendapatkan kesan wajah lebih segar untuk aktivitas sehari-hari, lima kelompok warna berikut bisa menjadi titik awal.

Salah satu kesalahan ketika membeli lipstik adalah memilih warna hanya berdasarkan namanya. "Rose", "nude", "coral", atau "berry" dapat memiliki interpretasi yang berbeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Warna kulit tangan dan warna bibir tidak selalu sama. Warna alami bibir, pigmentasi dan kondisi permukaan bibir dapat mengubah hasil akhir lipstik.

Nude Pink

Nude pink menjadi pilihan aman bagi pencinta makeup natural. Perpaduan warna nude dengan rona pink lembut memberikan warna pada bibir tanpa membuat tampilan terlihat terlalu berat. Hasilnya bisa memberikan kesan wajah lebih segar, terutama jika warna nude yang dipilih tidak terlalu abu-abu atau terlalu pucat dibandingkan warna alami bibir.

Untuk tampilan sehari-hari, nude pink dapat dipadukan dengan complexion ringan, blush bernuansa senada dan maskara. Namun, istilah "nude" sendiri tidak berarti satu warna yang cocok untuk semua orang.

Nude untuk kulit terang bisa terlihat berbeda pada kulit medium atau deep. Karena itu, jangan terpaku pada label "nude".

Cherry Red

Ingin wajah langsung terlihat lebih hidup? Cherry red bisa menjadi pilihan. Merah dengan karakter cerah memberikan kontras yang kuat pada wajah. Warna ini juga dapat membuat bibir menjadi pusat perhatian tanpa membutuhkan banyak makeup tambahan.

perhatian tanpa membutuhkan banyak makeup tambahan.

Kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Jika menggunakan cherry red, complexion dapat dibuat lebih ringan dan riasan mata cukup sederhana. Dengan begitu, warna bibir tetap menjadi statement tanpa membuat keseluruhan makeup terlihat berlebihan.

Peach Coral

Peach coral cocok untuk kamu yang ingin menghadirkan nuansa hangat pada wajah. Perpaduan rona peach dan coral memberikan kesan cerah dan playful. Warna ini juga mudah dipadukan dengan blush bernuansa peach atau coral untuk menciptakan tampilan monokrom yang terlihat harmonis.

Shade ini biasanya menarik bagi pemilik undertone hangat atau netral. Namun, pemilik undertone dingin tidak berarti harus menghindarinya. Pilih peach coral yang memiliki sedikit keseimbangan pink agar hasilnya tidak terlihat terlalu oranye. Peach coral juga cocok untuk makeup siang hari karena memberikan kesan ringan dan ceria. Padukan dengan blush tipis, maskara dan complexion natural untuk mendapatkan tampilan fresh dan effortless.

Soft Berry

Bagi yang merasa nude terlalu pucat tetapi cherry red terlalu berani, soft berry bisa menjadi jalan tengah.

Warna berry biasanya berada di antara rona merah, pink dan sedikit ungu. Dalam versi yang lebih lembut, warna ini memberikan pigmentasi yang cukup untuk membuat bibir terlihat hidup tanpa menciptakan kesan terlalu bold. Soft berry juga relatif fleksibel. Untuk bekerja atau kuliah, aplikasikan tipis

untuk mendapatkan efek seperti warna alami bibir. Untuk acara khusus, intensitasnya bisa ditambah agar terlihat lebih tegas.

Rose Pink

Rose pink menjadi pilihan bagi pencinta warna pink yang tidak terlalu mencolok. Rona rosy memberikan efek segar sekaligus feminin. Warna ini juga relatif mudah digunakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari bekerja, kuliah hingga hangout.

Rose pink dapat dipadukan dengan makeup bernuansa natural maupun sedikit lebih glamor. Jika ingin hasil yang lebih modern, pilih formula dengan hasil satin atau glossy. Sementara untuk tampilan yang lebih elegan, formula matte atau velvet dapat menjadi pilihan. Namun, sekali lagi, nama warna bukan jaminan hasil akhirnya akan sama pada setiap orang. (far,ist/dya)



Cherry Red



Peach Coral



Soft Berry



Rose Pink

Anatomi Korupsi...dari Hal 1

Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, babak baru skandal kuota haji tambahan resmi dibuka. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus yang akrab disapa Gus Yaqut itu didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan alokasi kuota haji periode 2022–2024 yang menyebabkan kerugian

keuangan negara mencapai Rp622,09 miliar (Rp622.090.207.166,41). Kerugian tersebut mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Modus Pengalihan Tanpa Kajian Teknis

Pangkal persoalan dalam perkara ini bermula dari keputusan menetapkan serta mengalihkan kuota haji khusus tambahan tahun 2023 dan 2024 sebesar 50 persen. Jaksa menegaskan bahwa kebijakan pengalihan separuh kuota tambahan tersebut diputus secara sepihak dan tanpa dilandasi kajian teknis resmi.

Langkah diskresional tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merusak skema antrean resmi. Pengisian kuota haji khusus tambahan tersebut dipaksakan untuk mengakomodasi jemaah tanpa masa tunggu (Tanpa-TO) demi memenuhi permintaan dari asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melakukan pengisian kuota haji khusus tambahan Tahun 2023 dan 2024 dengan jemaah haji khusus tanpa masa tunggu, jemaah haji khusus dengan masa tunggu tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tujuan untuk mengakomodir permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)," tegas Jaksa Penuntut Umum saat membacakan dakwaan di ruang sidang.

Praktik pengisian porsi terobosan ini tak cuma memotong jatah reguler, melainkan juga disertai penarikan fee percepatan keberangkatan secara sistematis dari para jemaah.

Perkara korupsi ini tidak berdiri tunggal di figur Yaqut semata. Dalam uraian JPU, perbuatan melawan hukum ini dilakukan Yaqut secara bersama-sama dengan tiga figur kunci lainnya. Ada na Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (mantan Staf Khusus Menteri Agama); Ismail Adham (Direktur Operasional PT Makassar Toraja/Maktour) dan Asrul Azis Taba (Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah/Kesthuri).

Rincian dakwaan Jaksa membongkar anatomi distribusi aliran dana yang tercipta dari praktik pemotongan kuota suci tersebut. Secara personal, Yaqut disebut memperkaya diri dalam bentuk

valuta asing.

"Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Terdakwa Yaqut Cholil Qoumas sejumlah USD 271.500," ujar JPU membeberkan rincian penerimaan. Uang ratusan ribu dolar AS itu merupakan imbalan komitmen atas penerbitan diskresi kebijakan.

Selain Yaqut, dakwaan mencatat aliran dana juga memperkaya Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Azis (Gus Alex) sebesar Rp93,6 miliar. Kebijakan ini sekaligus memberi keuntungan ekonomis kepada korporasi, di mana sebanyak 313 PIHK kecipratan nilai akumulatif mencapai Rp478,17 miliar.

Atas perbuatannya, Yaqut didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bantahan Yaqut

Selesai mendengarkan pembacaan dakwaan, pihak Yaqut Cholil Qoumas langsung melayangkan bantahan keras. Di hadapan awak media, Yaqut menyebut dakwaan JPU yang menuding dirinya memperkaya diri senilai USD 271.500 didasarkan pada asumsi belaka tanpa bukti riil.

Yaqut mendesak agar Pengadilan Tipikor menghadirkan pihak-pihak yang sebenarnya menikmati uang dari jual beli kuota tersebut.

"Terus terang saya tidak memahami dakwaan itu. Karena yang menerima uang itu orang lain, tetapi yang didakwa saya dengan asumsi. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari proses ini," cetus Yaqut usai sidang.

"Merekalah yang jual beli kuota, yang kemudian menerima fee dan seterusnya itu yang harusnya dihadirkan di sini. Yang menerima uang dari PIHK atau PIHK yang mendapat keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar," lanjutnya menekankan.

Tim kuasa hukum Yaqut membeberkan bahwa dari total 432 saksi yang diperiksa KPK dalam berkas dakwaan, tidak ada satu pun keterangan saksi yang menyatakan melihat atau menyerahkan aliran dana langsung ke tangan Yaqut. Berbekal sanggahan ini, kubu Yaqut mengonfirmasi akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada persidangan mendatang untuk mematahkan seluruh tuduhan KPK.

Kuasa hukum Yaqut, Dodi S. Abdulkadir, mencurigai perkara yang menjerat kliennya justru berpotensi menutupi praktik jual beli kuota haji yang selama ini berlangsung.

"Jangan-jangan perkara ini untuk menutup-nutupi praktik jual beli kuota haji yang selama ini masih berlangsung," kata Dodi se usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).

Dodi juga mempertanyakan tuduhan Yaqut menerima uang sebesar 271.500 dolar AS. Menurut dia, dakwaan jaksa tidak menguraikan secara memadai bukti mengenai penerimaan uang tersebut.

Ia menilai jaksa juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan Yaqut yang dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Menurut Dodi, uraian dalam dakwaan justru lebih banyak menjelaskan tindakan pejabat operasional Kementerian Agama bersama penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

"Dalam uraiannya, penuntut umum tidak juga mendeskripsikan apa perbuatan dari Gus Yaqut yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Justru semua uraian itu adalah perbuatan dari pejabat-pejabat operasional di Kementerian Agama bersama-sama dengan penyelenggara ibadah haji khusus yang diuraikan perdagangan kuota haji," ujar Dodi.

Dodi juga menyoroti nama Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur, yang disebut dalam uraian dakwaan. Namun, menurut dia, nama tersebut tidak lagi muncul pada bagian akhir dakwaan.

"Dan kemudian di tahun 2024 begitu juga diuraikan, namun ternyata di dalam akhir dakwaan tiba-tiba namanya hilang," kata Dodi.

Kondisi tersebut, menurut Dodi, menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana.

"Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan, ya, kenapa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain tetapi pertanggungjawaban pidanya dimintakan kepada Gus Yaqut sebagai menteri agama," ujarnya.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, mempertanyakan dasar jaksa menyebut tiga komponen dalam dakwaan sebagai kerugian keuangan negara.

Mellisa menilai uang yang disebut dalam tiga komponen tersebut bukan berasal dari keuangan negara, melainkan dari jemaah dan diterima oleh PIHK.

"Tapi kita bisa melihat secara gamblang, dari mana uang negara dari tiga komponen ini? Uangya dari jemaah, diterima PIHK, dinikmati PIHK. Ada pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan," ujar Mellisa.

Tak hanya itu, dari total 432 saksi dalam berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, tidak ada satu pun yang menyatakan atau membuktikan bahwa Yaqut menerima aliran uang. "Ratusan saksi yang diperiksa tidak ada yang menyebut klien kami menerima duit korupsi," katanya. (wid,rls,kcm,bbc/dya)

○○○

TIMELINE KASUS KORUPSI KUOTA HAJI

2024

- Agustus: ICW melaporkan dugaan korupsi kuota haji ke KPK.

2025

- 11 Agustus: KPK mencegah Yaqut, Ishfah Abidal Azis, dan Fuad Hasan Masyhur bepergian ke luar negeri.
- 13–15 Agustus: KPK menggeledah kantor Kemenag dan rumah Yaqut.
- 17 Agustus: KPK mengungkap dugaan upaya penghilangan barang bukti di kantor Maktour.
- 1 September: Yaqut diperiksa KPK dan dicecar 18 pertanyaan.
- September–Oktober: KPK memeriksa sejumlah pejabat dan saksi, serta menerima pengembalian Rp100 miliar dari biro travel haji.

2026

- 9 Januari: KPK menetapkan Yaqut sebagai tersangka.
- 11 Maret: PN Jakarta Selatan menolak praperadilan Yaqut.
- 12 Maret: KPK menahan Yaqut.
- 17 Maret: KPK menahan Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex.
- Juni: KPK menetapkan Ismail Adham dan Asrul Azis Taba sebagai tersangka dari pihak swasta.
- 11 Agustus: Yaqut menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan.



PEMBARUAN SUBSIDI ENERGI TERMASUK PAGU 2026

Tahun 2026

RP 210,06 T (Status: Pagu APBN Murni)

Tahun 2025

RP 185,2 T (Status: Realisasi)

Tahun 2024

RP 177,6 T (Status: Realisasi)

Tahun 2023

RP 164,3 T (Status: Realisasi)

Tahun 2022

RP 171,7 T (Status: Realisasi)

Tahun 2021

RP 131,6 T (Status: Realisasi)

Tahun 2020

RP 97,4 T (Status: Realisasi)

Tahun 2019

RP 136,9 T (Status: Realisasi)

Tahun 2018

RP 153,5 T (Status: Realisasi)

Tahun 2017

RP 97,6 T (Status: Realisasi)

Tahun 2016

RP 106,8 T (Status: Realisasi)

PERTALITE UNTUK ORANG KAYA DIBATASI, MOTOR TAK KENA

Pemerintah sepakat membatasi akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyepakati pembatasan tersebut untuk kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan Bahlil dan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/8/2026).inv

"Kita sudah menguji sistem, Pertamina punya sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamina atau yang lain," ujarnya.

Dengan skema itu, masyarakat kelompok ekonomi atas yang selama ini membeli Pertalite akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.

Purbaya belum dapat memastikan berapa besar penghematan subsidi yang akan diperoleh. Sebab, pembatasan akses terhadap Pertalite tidak serta-merta menurunkan konsumsi BBM.

"Konsumsi mungkin tetap akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi kan," kata Purbaya.

Ia mengatakan pemerintah masih mempelajari mekanisme teknisnya. Sistem Pertamina, kata dia, dapat diterapkan "mobil per mobil atau desil per desil".

"Yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," ujarnya.

Bahlil Benarkan Tak Tepat Sasaran

Bahlil mengatakan pembatasan diperlukan karena subsidi energi selama ini masih dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

"Selama ini, kan, kita tahu teman-

teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam," tutur Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah ingin mengubah pola penyaluran subsidi agar anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah lebih banyak diterima masyarakat yang berhak.

"Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," kata Bahlil.

Bahlil bahkan menyinggung penggunaan kendaraan mewah sebagai salah satu indikator yang menurutnya tidak selaras dengan penerimaan subsidi.

"Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi? Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," ujarnya.

Namun, pembatasan tersebut tidak ditujukan kepada pengguna sepeda motor.

"Enggak, sepeda motor enggak dibatasi kok. Berarti enggak ada perubahan untuk sepeda motor," kata Bahlil.

Artinya, fokus pemerintah saat ini

adalah membatasi konsumsi Pertalite pada kendaraan roda empat, terutama yang digunakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi.

Meski aksesnya akan diperketat untuk kelompok tertentu, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan.

Bahlil mengatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti, kan, ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik," tegas Bahlil. Dorongan untuk menata kembali penerima subsidi datang ketika beban subsidi energi pemerintah masih besar.

Pagu subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun. Anggaran itu terdiri atas subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) Rp25,14 triliun, subsidi LPG tabung 3 kilogram Rp80,26 triliun, dan subsidi listrik Rp104,64 triliun. Jika ditambah kompensasi energi, total anggaran subsidi dan kompensasi energi 2026 mencapai Rp381,3 triliun. (wid,rls,inv/dya)

Namun, pembatasan belum akan berlaku dalam waktu dekat. Pemerintah masih menyiapkan sistem sebelum menerapkannya secara bertahap.

Purbaya mengatakan pemerintah kemungkinan mulai menerapkan pembatasan dalam beberapa bulan mendatang.

"Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti, bukan sekarang, ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya kepada wartawan.

Menurut Purbaya, sistem yang dikembangkan PT Pertamina (Persero) sudah diuji. Ia mengklaim sistem tersebut memungkinkan pemerintah memilah konsumen berdasarkan desil ekonomi maupun kendaraan.